



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU

Jalan Jenderal Sudirman No. 315, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28131
www.pt-riau.go.id, admin@pt-riau.go.id, Telepon. (0761) 33768, Faksimile. (0761) 21523

Nomor : 10 / PAN.PT.W4-U/OT1.2/I/2025 Pekanbaru, 3 Januari 2025
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Laporan Tahunan Pelayanan
Informasi Tahun 2024 Pengadilan
Tinggi Riau

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Agung RI
CQ. Sekretaris Mahkamah Agung RI
Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta

Dengan Hormat,

Memenuhi surat Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagaimana pada pokok surat diatas, bersama ini kami kirimkan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi pada Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024, beserta dokumen laporan terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan kami mengucapkan terima kasih.

Panitera Pengadilan Tinggi Riau,


R. SENO SOEHARJONO SANTOSO

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 315, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28131
www.pt-riau.go.id, admin@pt-riau.go.id, Telepon. (0761) 33768, Faksimile. (0761) 21523

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode : Januari – Desember 2024

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan dalam “Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035”. Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Teknologi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat Pengadilan pada keempat lingkungan Badan Peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memberlakukan Layanan Informasi di Pengadilan diselenggarakan secara elektronik melalui media Layanan Informasi dan Dokumentasi secara elektronik (E-LID). Untuk pengadaan sarana dan prasarana IT dilaksanakan secara menyeluruh dan merata pada 4 (empat) lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.

Pengadilan Tinggi Riau yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah kota Pekanbaru Provinsi Riau dalam pelayanan informasi menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui *website* resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja PTSP, selama tahun 2024 terdapat 144 (seratus empat puluh empat) permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Tinggi Riau dengan rincian 45 (empat puluh lima) permohonan informasi perkara dan putusan, 18 (delapan belas) permohonan informasi kepegawaian, 1 (satu) permohonan informasi aset dan anggaran serta 80 (delapan puluh) permohonan data lainnya.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Pengadilan Tinggi riau dalam pelayanan informasi yaitu :

- a) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ;
- b) SMART PTSP Pengadilan Tinggi Riau (Memuat 14 (empat belas) jenis layanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat yaitu ; Virtual PTSP, Info Perkara Banding, Info Perkara BHT, Layanan Chatbot Data

Perkara, e-Monev SAKIP, Penyempahan Advokat, Izin Riset & Kerja Praktik, Informasi Layanan, Pengaduan, Survey Kepuasan Masyarakat & SPAK, Data Statistik, Live Chat PTSP, Inovasi Pengadilan Negeri dan Live Streaming PTSP) ;

- c) Website ;
- d) Komputer Informasi ;
- e) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ;
- f) Direktori Putusan Online ;
- g) TV Jadwal Sidang ;
- h) E-Court (Aplikasi persidangan online) ;
- i) SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) ;
- j) Akses Internet ;
- k) Jaringan Komputer (LAN) ;
- l) Sever ;
- m) P. C. Unit ;
- n) Laptop.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Ketua Pengadilan Tinggi Riau diberikan kewajiban untuk menunjuk Pejabat dan Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Tinggi Riau, dengan struktur sebagai berikut:

- a) Dewan Pertimbangan dijabat oleh Ketua dan Panitera ;
- b) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dijabat oleh Sekretaris ;
- c) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dijabat oleh Panitera Muda Hukum ;
- d) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dijabat oleh para Panitera Muda dan para Kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian ;
- e) Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh atasan PPID.

3. Anggaran

Anggaran yang dipergunakan untuk menunjang Pelayanan Informasi pada tahun 2023 ini bersumber pada DIPA Tahun Anggaran 2023 yaitu SP DIPA Nomor : SP DIPA- 005.03.2.400493/2024 Badan Peradilan Umum dengan jumlah sebesar Rp. 235.514.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Pemohon	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/Sel esai	Lainnya
Perkara & Putusan	45	2 hari	45	-	-	-	-	-
Kepengawaaian	18	2 hari	18	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisplipan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	1	2 hari	1	-	-	-	-	-
Lainnya	80	2 hari	80	-	-	-	-	-
Total	144	2 hari	144	-	-	-	-	-

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepengawaaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisplipan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi di Pengadilan Tinggi Riau, yaitu :

1. Tidak semua masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau dapat mengakses layanan *online* yang tersedia, dimana masih terdapat daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang masih tradisional.
2. Para pihak yang ingin bertemu dengan Penjabat Pengadilan.
3. Belum adanya tenaga yang mengerti Bahasa Isyarat guna memenuhi kebutuhan informasi bagi Penyandang Disabilitas.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

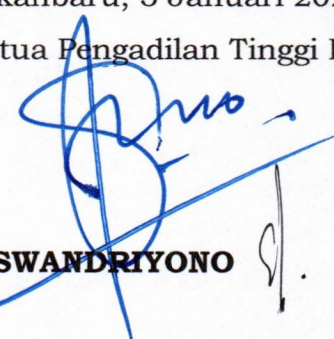
Berikut adalah rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat kami sampaikan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi :

1. Melakukan sosialisasi dan proaktif memberikan penjelasan kepada pengunjung bahwa informasi pada Pengadilan Tinggi Riau dapat juga diakses secara *online*.
2. Melakukan pengawasan terhadap petugas piket meja informasi.
3. Selalu meng-*update* informasi terbaru yang digunakan pada Pengadilan Tinggi Riau.

Demikianlah Laporan Tahunan Pelayanan Informasi tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan pelayanan informasi selanjutnya.

Pekanbaru, 3 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Riau,



SISWANDRIYONO